
Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia

Baiq Sidni Cahyati*, Fayza Az Zahra, Nur Naima, Nur Hasanah

Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

*Corresponding author: sidnibaiq06@gmail.com, fayzaazzahra471@gmail.com, nurnaima32@gmail.com, nurhasanah_fkip@unram.ac.id

Article History

Received: January 17th, 2024

Revised: February 08th, 2024

Accepted: February 16th, 2024

Abstract: Peran demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 dalam membangun karakter dan jati diri suatu bangsa sangatlah penting berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Demokrasi, sebagaimana disoroti dalam konteks pendidikan dan kewarganegaraan, bertujuan untuk mempersiapkan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, memastikan adanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Hal ini mencakup penanaman kesadaran akan demokrasi sebagai pandangan hidup yang menjamin hak dan kewajiban setiap individu untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia yang merangkum nilai-nilai luhur dan budaya bangsa, menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia. Terdiri dari lima nilai, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, yang secara kolektif membentuk perilaku masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang mengakar kuat dalam masyarakat dan budaya Indonesia mewakili hakikat jati diri dan karakter bangsa. Sebaliknya UUD 1945 berperan penting dalam membentuk jati diri bangsa dengan mencerminkan budaya dan ciri khas bangsa. UUD 1945 juga berfungsi sebagai landasan hukum dan ideologi nasional Indonesia, yang mewujudkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Undang-Undang Dasar yang disusun melalui musyawarah dan mewakili prinsip filosofis bangsa Indonesia, yang mengedepankan demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan.

Keywords: Demokrasi, Karakter, Pancasila, UUD 1945

PENDAHULUAN

Pemahaman yang mendalam terhadap konsep demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan utama bagi kemajuan sebuah bangsa, terutama dalam konteks Indonesia yang majemuk dan beragam. Sebagai negara yang mengusung prinsip demokrasi, Indonesia mengakui pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan, generasi muda Indonesia dituntut untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut guna mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Penelitian ini mengangkat isu penting tentang bagaimana pemahaman yang kuat

terhadap demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 yang dapat menjadi fondasi kokoh bagi generasi muda Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, generasi muda tidak hanya diharapkan menjadi penerima dan pengikut, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab dalam mengisi ruang-ruang partisipasi politik dan sosial. Kita sebagai generasi muda, dengan pemahaman kuat yang kita miliki tentang demokrasi, kita dapat mengambil peran aktif dalam proses politik, memastikan partisipasi yang inklusif, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila berperan sebagai dasar negara, memberikan kerangka kerja bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Sementara UUD 1945 memberikan landasan hukum yang mengatur struktur negara dan hak-hak warga negara. Melalui pemahaman yang

komprehensif tentang ketiga konsep ini, kita sebagai generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.

METODE

Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah metode kualitatif, dimana kami melakukan pembuatan atau penyusunan artikel ini dengan berdasarkan dari sumber-sumber referensi yang kelompok kami dapatkan dan dari hasil pemikiran dan diskusi kelompok kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" (rakyat) dan "kratos" (pemerintahan). Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diambil dalam bahasa sanskerta yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara artinya, bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam pancasila dan tidak boleh bertentangan. (Oksep, A. 2015). Undang Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Prinsip-prinsip Demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945

Prinsip-prinsip Demokrasi:

Ada beberapa prinsip yang sebaiknya dapat kita implementasikan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip

tersebut dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam penerapan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Sukarna (1979: 40-42), yakni sebagai berikut;

- 1) Pembagian kekuasaan: Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- 2) Pemerintahan Konstitusional
- 3) Pemerintahan berdasarkan hukum: Hukum yang tertinggi, persamaan dimuka hukum, dan persamaan sosial.
- 4) Pemerintahan mayoritas
- 5) Pemerintahan dengan diskusi
- 6) Pemilihan umum yang bebas
- 7) Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya
- 8) Manajemen terbuka: ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah
- 9) Pers yang bebas
- 10) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
- 11) Perlindungan terhadap hak hak azasi manusia
- 12) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- 13) Pengawasan terhadap administrasi negara
- 14) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah
- 15) Kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain
- 16) Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil system
- 17) Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi
- 18) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan
- 19) Konstitusi /Undang-undang Dasar yang Demokratis
- 20) Persetujuan

Dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi tersebut, maka akan memungkinkan suatu sistem pemerintahan yang dapat menjamin dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dibina.

Prinsip-prinsip Pancasila:

Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat di Pancasila, yakni sebagai berikut;

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama masing-masing. Pancasila mengakui keberagaman agama dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan dan kebenaran.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia harus dihormati, dihargai, dan diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak adanya perbedaan-perbedaan dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

3) Persatuan Indonesia

Prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Segala bentuk macam tindakan yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan negara harus kita hindari.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kebijakan negara diambil melalui proses musyawarah dan mufakat. Perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum untuk memutuskan kepentingan bersama. Musyawarah sangat penting jika kita ingin memutuskan suatu masalah.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini menegaskan perlu adanya kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu besar antara golongan masyarakat, dan negara yang berupaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.

Prinsip-prinsip UUD 1945:

Undang Undang Dasar 1945 memiliki prinsip prinsip yang bersifat kekal dan luhur yang akan menjamin suatu system atau bentuk negara serta

cara penyelenggaraan beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Oleh karna itu Undang Undang harus diberikan tempat yang tinggi diantara peraturan perundang-undangan yang lain dengan konsekuensi tidak adanya tindakan ataupun keputusan yang bertentangan dengan undang undang dasar.

Peran Demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 dalam membangun karakter dan identitas bangsa.

A. Peran Demokrasi

Dalam konteks Indonesia, demokrasi dipandang sebagai nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang berfokus pada pengembangan karakter dan identitas bangsa, dianggap sebagai strategi yang efektif dalam membangun kesadaran dan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan dan budaya demokrasi yang saat ini dikembangkan di Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan berjiwa sesuai dengan pedoman nilai-nilai Pancasila, serta mempertahankan identitas nasional dan filosofi bangsa Indonesia.

Dalam membangun sebuah karakter dan identitas bangsa, pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia harus bisa mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan konstitusi dan budaya bangsa. Hal ini meliputi pengembangan kemampuan warga negara dalam memberikan keputusan yang baik atau buruk, memelihara kebaikan, dan mempertahankan hak-hak warga masyarakat, serta mengembangkan kesadaran dan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dalam sintesis, peran demokrasi dalam membangun karakter dan identitas bangsa Indonesia meliputi :

- Pengembangan kesadaran dan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
- Pengembangan kemampuan warga negara dalam memberikan keputusan yang baik atau buruk, memelihara kebaikan, dan mempertahankan hak-hak warga masyarakat.
- Pengembangan budaya demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, yang

berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan berjiwa sesuai dengan pedoman nilai-nilai Pancasila.

- Pengembangan identitas nasional yang dinamis, dipengaruhi oleh potensi dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa, serta didukung dengan partisipasi rakyat dalam memajukan bangsa Indonesia.

B. Peran Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, memainkan peran krusial dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang kuat dan berkepribadian. Karakter bangsa Indonesia yang diinginkan melalui pendidikan Pancasila adalah yang memiliki nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai identitas nasional, sebagai sumber motivasi, inspirasi, dan pedoman berperilaku. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi semua tantangan dan perubahan zaman, serta membentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas.

Dalam sintesis, Pancasila memainkan peran krusial dalam membangun sebuah karakter dan identitas bangsa Indonesia, dengan fokus pada pembentukan kepribadian yang kuat, etika yang baik, dan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia.

C. Peran UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memainkan peran penting dalam membangun sebuah karakter dan identitas bangsa Indonesia. UUD 1945 tidak hanya berlaku sebagai konstitusi negara, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945, adalah sebuah dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia, serta menjadi pedoman bagi perilaku dan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, UUD 1945 dapat mempengaruhi pembentukan karakter bangsa melalui pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiakawanan, dan kebersamaan, yang tercermin dalam perilaku kolektif kebangsaan. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur simbol-simbol nasional seperti bendera, bahasa,

lambang, dan lagu kebangsaan, yang membedakan Indonesia dengan negara lain dan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, UUD 1945 berperan sebagai landasan moral dan identitas bangsa yang membantu membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Implementasi nilai-nilai demokrasi, Pancasila, UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A. Implementasi nilai-nilai demokrasi

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, harus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi beberapa aspek, seperti:

Pengembangan Karakter: Nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, terbuka dalam berkomunikasi, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan warga masyarakat yang demokratis. **Pendidikan:** Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan strategi pembelajaran yang digunakan, serta keteladanan yang baik dari perilaku guru. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat dapat menentukan pilihannya baik dalam politik (lewat pemilu) maupun dalam bidang-bidang lain, serta dapat turut serta dalam pembangunan lewat berbagai aktivitas dan kreativitas. **Pengakuan dan Penerapan Demokrasi:** Penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan pengakuan dan penerapan menyeluruh atas demokrasi oleh bangsa dan Negara yang bersangkutan. Jika demokrasi diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal yang sama dengan sendirinya akan terjadi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat: Faktor pendukung seperti sarana prasarana sekolah yang memadai, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah yang bijaksana dapat membantu implementasi nilai-nilai demokrasi, sedangkan faktor penghambat seperti kurang perhatian dari orang tua dapat menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi.

B. Implementasi nilai-nilai Pancasila

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan beradab. Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional, memuat lima nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila ini bertujuan untuk mencapai kesadaran dan kesepakatan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, beberapa langkah dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Selain itu, juga diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan kehidupan yang harmonis dan beradab, serta mempertahankan identitas bangsa yang kuat dan berkeadilan. Dalam sintesis, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia sangat penting untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan beradab. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

C. Implementasi nilai-nilai UUD 1945

Implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara di Indonesia telah menjadi bagian penting dari upaya menjaga konsistensi dan keberlanjutan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah beberapa aspek implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memuat sila-sila yang pada intinya berisikan lima nilai Pancasila yang mendasar. UUD Tahun 1945 yang berisikan aturan pokok serta sesuai dengan kebutuhan, kehidupan, berbangsa dan bernegara terutama bangsa Indonesia. Kesadaran Hukum Masyarakat: Implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga memfokuskan pada kesadaran hukum masyarakat, dimana setiap warga negara harus memiliki kesadaran akan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Pengkayaan Pandangan dan Pemikiran: Implementasi nilai-nilai UUD 1945 juga dapat menjadi sarana yang efisien dan efektif untuk pengkayaan pandangan dan pemikiran. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pengembangan Sistem Hukum: Implementasi nilai-nilai UUD 1945 juga mempengaruhi pengembangan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu dalam menciptakan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Pengembangan Wawasan Kebangsaan: Implementasi nilai-nilai UUD 1945 juga mempengaruhi pengembangan wawasan kebangsaan di Indonesia. Wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu dalam menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Dalam sintesis, implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia memfokuskan pada pengembangan kesadaran hukum masyarakat, pengkayaan pandangan dan pemikiran, pengembangan sistem hukum, dan pengembangan wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945

Peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 sangat penting dan strategis. Mereka diharapkan sebagai agen perubahan yang aktif dalam mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, serta memainkan peran yang lebih aktif dalam mengawal pemilu dan memastikan demokrasi tetap hidup dan stabil. Berikut adalah beberapa aspek peran generasi muda yang relevan: Pendidikan Politik dan Demokratisasi: Generasi muda harus diberikan pendidikan politik yang seimbang dan demokratisasi untuk memahami pentingnya peran mereka dalam membentuk masa depan negara dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap pemuda mengenai berdemokrasi yang sehat, damai dan sesuai dengan masanya. Mengawal Pemilu: Generasi muda berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mengawal pemilu. Keterlibatan pemuda yang sadar pemilu dalam ekosistem digital kita akan meminimalisir konten-konten negatif di dunia digital. Mereka harus memastikan demokrasi tetap hidup dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila: Generasi muda sebagai Agent of Change berperan penting dalam menjaga dan mengimplementasikan seluruh nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Mereka harus memiliki pemikiran yang kritis, karakter yang kuat, kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu memahami pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Mengisi Pembangunan dan Memertahankan Ideologi dan Kemerdekaan Bangsa: Generasi muda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan ideologi dan kemerdekaan bangsa. Mereka harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pemuda yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan. Mengawal UUD 1945: Generasi muda harus memahami dan mengawal Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang fundamental. Mereka harus mempertahankan ideologi bangsa dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia selama ini. Dalam sintesis, peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 melibatkan pendidikan politik dan demokratisasi, mengawal pemilu, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mengisi pembangunan dan mempertahankan ideologi dan kemerdekaan bangsa, serta mengawal UUD 1945. Mereka harus memiliki karakter yang kuat, kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, dan kemampuan untuk memahami pengetahuan dan teknologi agar dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengembangkan demokrasi dan mempertahankan ideologi bangsa.

KESIMPULAN

Pemahaman yang mendalam tentang demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kunci bagi generasi masa depan untuk membangun Indonesia yang maju. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya memahami konsep-konsep tersebut dalam konteks Indonesia modern. Dengan pemahaman yang kuat tentang demokrasi, generasi muda dapat mengambil peran aktif dalam proses politik, memastikan partisipasi yang inklusif, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan kerangka kerja bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Sementara UUD 1945 memberikan landasan hukum yang mengatur struktur negara dan hak-hak warga negara. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang ketiga konsep ini, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.

REFERENSI

- Abd Mu'id Aris Shofa (2011). Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa & Negara by admin fis | Oct 19, 2011 | Jurnal FIS.
- Azyumardi Azra (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Demokrasi di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional

- Pendidikan Kewargaan, (Jakarta: 28-29 Mei 2001) h.77.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi Di Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurafifah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 98–104.
- Rosyad, AM, & Maarif, MA (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (1), 75-99.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Sarifah, Lailatus. A. (2017). Penanaman Nilai Demokrasi dalam Boarding School di SMP IT (Islam Terpadu) Ihsanul Fikri Kabupaten Magelang, (Online), (<https://lib.unnes.ac.id>, diakses 17 November 2019).
- Zamroni (2001). *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*, (Yogyakarta): *Bigraf Publishing* 2001) h.92.